



# RELIGIOSITY INDEX 2021

## EXECUTIVE SUMMARY

BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA RI





# RELIGIOSITY INDEX 2021

## *Executive Summary*

*Disusun berdasarkan hasil penelitian Religiosity Index tahun 2021*

### **Pelindung**

Prof. Dr. Ahmad Gunaryo, M.Soc

*Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*

### **Pengarah**

Prof. Dr. Moh Isom, M.Ag

*Sekretaris Badan Litbang dan Diklat*

### **Penanggung jawab Kegiatan**

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D

*Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan*

### **Ketua Tim Peneliti:**

Dr. Mahmud Syaltout, S.H., DEA.

### **Tim Peneliti UIN SATU**

Dr. phil. Syaifudin Zuhri, MA; Dr. Ngainun Naim, M.H.I; Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag; Amrullah, M.Hum; Rizki Riyadu Taufiq, MA; Raudhatul Ulum, ME; Anik Farida, M.Hum; Muhammad Zulkarnain, M.Si; Alfon Satria Harbi, M.Si; Bimantoro Kushari, M.Si; Salma Syakira Widodo, S,lp; Akhol Firdaus, MA., Elis Yusniawati MA

**Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jakarta, 2020**



# EXECUTIVE SUMMARY

## RELIGIOSITY INDEX 2021

ISBN : xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Desain Cover dan Layout: A.S. Harbi

vi + 9 hlm; 21 x 29,7 cm | Cetakan I, 2020

© Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

**Diterbitkan Oleh:**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Jl. H. M. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Telp/Fax: (021) 21201516, 3920380, 3920674

Website: [balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Email : [balitbangdiklat@kemenag.go.id](mailto:balitbangdiklat@kemenag.go.id)



## Daftar Isi

<b>Executive Summary</b> .....	5
<b>Pengantar</b> .....	5
<b>“Agama Sebagai Inspirasi” dalam Empat Dimensi</b> .....	6
Persaudaraan Keagamaan (Religious Fraternity) .....	6
Persaudaraan Kebangsaan (National Fraternity) .....	8
Persaudaraan Kemanusiaan (Human Fraternity) .....	10
Kestinambungan Lingkungan (Enviromental Sustainability) .....	11
<b>Metode</b> .....	14
<b>Temuan</b> .....	17
<b>Analisis Masalah</b> .....	19
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Keagamaan .....	19
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kebangsaan .....	20
Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan .....	22
Dimensi Permasalahan Keberlangsungan Lingkungan .....	23
<b>Rekomendasi</b> .....	24
Krisis Persaudaraan Kebangsaan .....	25
Krisis Persaudaraan Keagamaan .....	26
Krisis Persaudaraan Kemanusiaan .....	28
Krisis Kestinambungan Lingkungan .....	28



## Executive Summary

### Religiosity Index 2021

Religiosity index is a strategic academic platform and research that observes the interplay between religions with four large sectors of fraternity: religious fraternity, national fraternity, human fraternity, and religious-inspired environmental sustainability. These four key concepts feature as the main indicators with which religion as inspiring -than aspirational- force for common good.

Religiosity Index merupakan platform akademik dan penelitian yang mengamati kaitan antara agama dengan empat dimensi penting yang menjadi tema religiosity index, yakni persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan, dan kesinambungan lingkungan. Keempat dimensi penting ini menjadi konsep fundamental yang menjelaskan peran dan posisi agama sebagai inspirasi -ketimbang sebagai aspirasi- yang penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama

### Pengantar

Pada dekade awal abad ke-20, sejumlah ilmuwan moderen memprediksi bahwa agama merupakan residu modernitas yang pada satu periode akan ditinggal dan menjadi peradaban manusia warisan masa lalu dan musnah. Tesis ini semakin diperkuat dengan berbagai argumen yang menempatkan agama sebagai antitesa modernitas, misalnya tesis tentang inkompatibilitas agama dan demokrasi dan Hak Asasi Manusia/HAM. Argumen ilmuwan moderen ini sudah tidak berlaku lagi karena, seperti diperlihatkan melalui beberapa riset mutakhir, agama mengalami kebangkitan. Di banyak negara sekuler, seperti Amerika dan negara-negara Eropa, agama menjadi prinsip nilai yang semakin menguat. Di Indonesia, kebangkitan agama diperlihatkan dengan sejumlah hasil survey, misalnya yang dilakukan Alvares pada tahun 2017 yang menemukan bahwa agama menjadi identitas penting 95% masyarakat Indonesia. Agama tidak saja menjadi identitas personal, namun menjadi inspirasi dalam setiap perubahan, termasuk dalam proses pembentukan negara bangsa, demokratisasi, kebangsaan, hak asasi



manusia, dan keberlangsungan lingkungan hidup. Karenanya, religiosity index menempatkan agama sebagai sentrum dalam setiap perubahan dan sikap personal serta sosial, yakni menempatkan “**agama sebagai inspirasi**” baik yang eksplisit maupun diterjemahkan secara implisit sebagai motor dan sumbu perubahan dalam masyarakat.

“Persaudaraan merupakan anti-tesa terhadap utopia monolitisme dan keseragaman sebagaimana dibayangkan melalui gagasan *ummat*. Sebaliknya, gagasan *ukhuwah* atau persaudaraan membayangkan keragaman dan signifikansi toleransi dalam keragaman”

### “Agama Sebagai Inspirasi” dalam Empat Dimensi

Persaudaraan atau dalam Islam dikenal melalui konsep *ukhuwah* merupakan gagasan penting yang dilontarkan K.H. Achmad Shiddiq (1926-1991) pada tahun 1989. Konsep persaudaraan tersebut terdiri dari tiga pilar utama, yakni *ukhuwah islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwan basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan). Setelah tiga dekade dilontarkan, konsep persaudaraan ini menemukan relevansinya, utamanya di tengah-tengah romantisme-utopis sebagian umat Islam tentang doktrin *ummat*. Konsep persaudaraan merupakan anti-tesa terhadap utopia monolitisme dan keseragaman sebagaimana dibayangkan melalui gagasan *ummat*. Sebaliknya, gagasan *ukhuwah* atau persaudaraan membayangkan keragaman dan signifikansi toleransi dalam keragaman. Dalam Religiosity Index, tiga persaudaraan yang diadopsi dari gagasan K.H. Achmad Shiddiq diadopsi dan ditambahkan satu pilar persaudaraan lain, yakni persaudaraan manusia dengan lingkungan hidup yang juga menjadi isu krusial yang perlu disikapi oleh seluruh agama dan para pemeluknya.

#### **Persaudaraan Keagamaan (Religious Fraternity)**

‘Persaudaraan keagamaan’ merupakan sikap atau tindakan toleransi yang berlangsung di internal agama maupun dalam relasi antar-agama. Persaudaraan keagamaan meliputi semangat keagamaan yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kebebasan beragama/berkepercayaan, sekaligus semangat untuk mengeliminasi semua jenis tindakan intoleransi dan diskriminasi. Dalam Islam misalnya, komitmen persaudaraan keagamaan ini



ditegaskan pada pondasi syari'at Islam yang diletakan secara kokoh pada argumentasi kemaslahatan dan keadilan bagi semua manusia. Argumentasi seperti ini ditemukan dalam tujuan atau alasan syari'ah Islam (*Maqāsid As-Shari'ah*). Asy-Syatibiy dalam *al-Muwāfaqād* yang secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan diterapkannya hukum syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak (Abu Ishaq Asy-Syātibiy, 2004: 220).

Sentralitas persaudaraan keagamaan juga menjadi prinsip fundamental dalam doktrin Katolik dan Kristen. Kedua agama ini menempatkan manusia dalam kedudukan yang sangat istimewa karena ia merupakan 'gambaran dan rupa Allah' (Kejadian 1: 26-27). "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah yang diciptakannya-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." Doktrin tersebut selain menegaskan bahwa manusia merupakan perwujudan yang istimewa di antara semua ciptaan Tuhan, sekaligus menggambarkan kewajiban dan tanggung jawab manusia dalam menciptakan kesentosaan di antara seluruh ciptaan Tuhan. Kewajiban ini bersifat holistik karena meliputi relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesama manusia, dan relasi manusia dengan alam semesta. Doktrin manusia sebagai 'citra Allah' berimplikasi pada keharusan semua pemeluk Katolik dan Kristen untuk selalu menebarkan cinta kasih kepada sesama manusia sebagai sikap religious seorang Kristen/Katholik sebagaimana ditegaskan dalam Matius (22: 37-40) Yohanes (4: 7-20).



Dalam Konghucu, *WU Chang* menyebutkan *Ren* atau *Jin* (sifat cinta kasih), *I* atau *Gi* (solidaritas), dan *Ce* atau *Ti* (bijaksana) merupakan perintah membangun persaudaraan keagamaan

Dalam Hindu, persaudaraan keberagamaan didasarkan kewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama, toleransi, solidaritas, dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan keyakinan yang dianutnya seperti dijelaskan dalam *Atharvaveda III. 8.5*, *Atharvaveda III.30.4*, *Rgveda X.191.2*,





*Rgveda X.191.3, Rgveda X.191.4, Atharvaveda XII.1.45*. Dalam Budha, kita juga menemukan perintah kerukunan dan toleransi antar umat bergama dalam Kitab Tripitaka, *Digha Nikaya I:3*, Kitab Tripitaka, *Upali Sutta: 16*, Sabda Buddha, *Dhammapala 3-4*, dan *Maklumat Raja Asoka*. Sementara itu, dalam Konghucu, *WU Chang* menyebutkan *Ren* atau *Jin* (sifat cinta kasih), *I* atau *Gi* (solidaritas), dan *Ce* atau *Ti* (bijaksana) merupakan perintah membangun persaudaraan keagamaan.

### **Persaudaraan Kebangsaan (*National Fraternity*)**

Persaudaraan kebangsaan dapat dimaknai sebagai jalinan solidaritas dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Bagi Ernest Renan, bangsa adalah satu jiwa (*une nation est un âme*). Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (*une nation est un grand solidarité*). Mereka diikat oleh kehendak untuk hidup bersama (*le désir d' être ensemble*) (Latif, 2013). Sedangkan Otto Bauer (Latif, 2013) mendefinisikan bangsa sebagai sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Dalam pengertian yang lain, Benedict Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang terbayang—dan dibayangkan sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat. Artinya, meski masing-masing individu tidak pernah mengenal ataupun bertemu satu sama lain, tapi di masing-masing benaknya terbayang atau tergambar jelas tentang persatuan-kesatuan. Bangsa dengan demikian—lepas dari ketidakadilan dan penindasan—menjadi semacam persaudaraan horizontal yang mendalam dan memupuk nasionalisme (Anderson, 2020).

Dalam bahasa Islam, persaudaraan kebangsaan dapat diterjemahkan melalui konsep *ukhuwah wathaniyah* yang berarti persaudaraan dalam konteks negara-bangsa tanpa membedakan suku, ras, bahasa dan agama di tempat tersebut (Azhar, 2017). Bentuk persaudaraan ini disebutkan dalam al-Quran (*al-Hujurat: 13*, *Al-Maidah: 2*, dan *Taha: 55*). Dalam tradisi Katholik, doktrin cinta tanah air dan politik kebangsaan menjadi pondasi doktrin seperti dijelaskan dalam *Matius 22:21*: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib





kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah". Dalam tradisi Kristen, persaudaraan kebangsaan dapat dirumuskan melalui doktrin persaudaraan sejati yang menerjang batas bangsa, agama, suku, kelas, kebudayaan, dan gender. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang mengamalkan kasih secara tulus ikhlas. Di sisi lain dalam (Yohanes 13:34) juga dikatakan "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi." Doktrin teologis ini menjelaskan bahwa dalam Kristen konsep persaudaraan tidak hanya mengenal untuk sesama agama melainkan lintas bangsa yang sangat plural dan terbuka. Dalam tradisi Budha, persaudaraan digambarkan sebagai cinta kasih dan norma kehidupan. Pengembangan cinta kasih atau *Mettā* adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan. Dalam Hindu, dasar berbangsa dan bernegara bersumber dari yang "suci" karena dibangun dengan landasan etika. Dalam Hindu, etika diposisikan sebagai bagian keluarga dan masyarakat dan merupakan syarat untuk menjadi manusia yang dapat membimbing manusia lain untuk mencapai kebahagiaan sejati. Etika dalam bahasa *Sansekerta* didefinisikan sebagai susila, digunakan sebagai tolok ukur baik atau buruknya suatu tindakan atau perilaku seseorang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan mengacu pada aspek *karma marga* maupun *jnana marga* (IK Donder, n.d.).

Dalam tradisi Khonghucu, sikap hidup berbangsa dan bernegara didasarkan pada Kitab *Lun Yu* menyebutkan bahwa, "*Pemerintahan yang berdasarkan kebajikan itu laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, dan bintang-bintang mengelilinginya.*" (Mengzi VII A:3). Ayat ini menjadi inspirasi umat Khonghucu, tentang bagaimana sikap mereka sebagai rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah (negara) digambarkan sebagai poros, sedangkan rakyat berada pada sisi-sisi yang mengkatnya dan harus patuh pada pemerintah. Selain itu, Khonghucu mengenal seperangkat aturan bagi manusia terkait relasinya dengan kehidupan dunia. Relasi tersebut



diklasifikasikan dalam tiga model hubungan, yakni *Di Dao* (hubungan manusia dengan alam), *Re Dao* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Tian Dao* (hubungan manusia dengan Tuhan). Dari ketiga relasi tersebut, wawasan kebangsaan umat Konghuchu banyak mengacu pada model relasi *Di Dao* dan *Ren Dao*. Konsep *Di Dao* sendiri tidak sekadar menekankan tentang bagaimana manusia berelasi dengan lingkungan, namun juga tentang bagaimana manusia harus ikut serta menata negerinya.

### **Persaudaraan Kemanusiaan (Human Fraternity)**

Dalam Islam, prinsip kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah/basyariyah*) menempati posisi fundamental dalam beragama. Doktrin ini tercermin dalam al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah setara dan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sebagai khalifah Allah di bumi. Tujuannya adalah agar manusia menebar kebaikan di muka bumi. Ajaran kasih sayang untuk sesama manusia adalah inti ajaran Kristen. Dalam bible, nasehat ini disampaikan oleh Yesus dengan mengisahkan kebaikan seorang Samaria saat menolong pria dengan keadaan lemah tidak mempunyai daya di tengah jalan. Begitu juga yang terdapat dalam Matius yang memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka dia harus berbuat baik pula kepada orang lain. Perlakuan kasih sayang ini juga harus dilakukan berimbang kepada seluruh umat manusia. Sementara itu, dalam Hindu, ajaran kasih sayang terhadap manusia ditemukan dalam Yajur Veda 36.18 yang menyebutkan "*Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat, semoga kami pandang memandang dengan pandangan mata seorang sahabat.*" Dalam agama Budha terdapat pilar Brahma Vihara yaitu *metta, karuna, mudita, dan upeksha*, yang berarti cinta tanpa pamrih, belas kasih, rasa simpati, dan keseimbangan batin. Keempatnya ini bersumber kepada Upanishad dan Sutra Yoga Oatanjali dalam Sutra 1:33: "*Dengan memupuk sikap ramah terhadap yang bahagia, belas kasihan bagi yang tidak bahagia, senang akan yang saleh, dan mengabaikan orang jahat, pikiran akan mempertahankan ketenangannya yang tidak terganggu.*"



Dalam Khonghucu, belas cinta kasih kepada yang terdapat dalam agama Khonghucu terdapat dalam kitab Mengzi bab 6 A ayat ke tujuh yang berbunyi: "*Adapun rasa hati berbelas-kasih itu menunjukkan adanya benih cinta kasih, rasa hati malu dan tidak suka itu menunjukkan adanya benih kesadaran menjunjung kebenaran, rasa hati hormat dan mengindahkan itu menunjuk kan adanya benih kesusilaan, dan rasa hati membenarkan dan menyalahkan itu menunjukkan adanya benih kebijaksanaan.*" Khonghucu mempunyai ajaran 4 watak sejati yang secara instingtif sudah dipunyai oleh manusia sejak dirinya lahir ke dunia, yakni *ren* (cinta kasih), *yi* (kebenaran), *li* (kesusilaan), dan *zhi* (kebijaksanaan, pengetahuan). Cinta kasih atau yang disebut dengan *ren* menunjukkan bahwa manusia harus mampu harmonis dan selaras dengan manusia yang lain.

### ***Kesinambungan Lingkungan (Environmental Sustainability)***

Kesinambungan lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam semua ajaran agama. Semua agama memiliki prinsip ataupun ajaran dalam mengelola lingkungan hidup; bagaimana hubungan manusia dengan alam, masing-masing agama memiliki landasan masing-masing. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, *teo-echology* merupakan istilah yang cukup menarik (Hoel & Nogueira-Godsey, 2011). Sebagai sebuah perspektif, *teo-echology* berpandangan bahwa krisis ekologi kontemporer tidak dapat dilepaskan dengan krisis religiusitas dan spiritualitas kehidupan manusia. Alam adalah representasi atas kehadiran Tuhan dan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Alam dan manusia adalah satu entitas kosmos yang tidak dapat dipisahkan (Nasr, 1994, 26–27), (Nasr, 2009, 6–7), (Nasr, 1996, 159).

*Eco-theology* (ekoteologi) juga merupakan konsep lain yang menyorot relasi agama dan kesinambungan alam. Dalam *ekoteologi*, manusia diletakkan sebagai pengasuh rumah tangga Allah, yakni bumi, sama seperti adam dan hawa diperintahkan untuk menjaga dan merawat taman Eden (Kejadian.1:15) (Muda, 2020) (McFague, 1987). Ekoteologi memposisikan Tuhan berada di alam semesta. Artinya, alam adalah ejawantah dari Tuhan.



Sehingga, merusak alam sama halnya merusak Tuhan. Selain itu, ekotologi juga mendorong agar manusia tidak rakus dan menjadi semena-mena dalam mengelola alam yang merata menggunakan dalil manusia dilahirkan untuk menggunakan alam semesta.

Dalam pandangan agama-agama, terhadap banyak ajaran yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam. Dalam Budha, lingkungan berkelanjutan dapat disimak melalui Dhammapada IV, Pupphavagga: Bunga, 49: *Seperti lebah-tanda merusak bunga, warnanya, keharumannya-mengambil nektarnya dan terbang menjauh: demikian juga orang bijak harus melewati desa.*" Dari ajaran ini setiap manusia diajarkan tetap diperbolehkan menggunakan lingkungan hidup untuk kehidupannya namun tidak sampai merusak. Dalam Sutta Pitaka menguraikan tentang semua kotbah Sang Budha yang mencakup berbagai aspek di 31 alam kehidupan, salah satunya tentang kehidupan manusia dengan alam (Santoso et al., 2020).

Dalam tradisi Kristen, terdapat seratus ayat dalam Alkitab yang membahas tentang perlindungan lingkungan. Agama Kristen memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan dan mendorong perilaku demi kebaikan masa depan. Kajian teologis selanjutnya terdapat dalam Kolase 1: 23, dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus dunia diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaan-Nya. Sekarang alam berada di bawah kuasa-Nya dan dengan demikian kosmos mengalami pendamaian. Kristus membawa pendamaian dan keharmonisan bagi semua ciptaan melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Penebusan Kristus juga dipahami sebagai penebusan kosmos yang mencakup seluruh alam dan ciptaan. Penyelamatan juga mencakup pendamaian atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara manusia dan ciptaan lainnya. Dalam Hindu, banyak sekali ajaran yang menginspirasi manusia melakukan pelestarian alam. Bahkan, Hindu adalah agama yang berakar kuat di alam. Teks suci agama Hindu (Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, Epik) mempunyai referensi transendental yang berhubungan dengan alam, seperti sungai, gunung, pohon, hewan, dan bumi. Hindu juga mengenal teo-ekologi.



Prespektif agama Hindu teo-ekologi adalah konsepsi pantheisme atau dikenal dengan paham mempercayai Tuhan identik dengan dunia nyata atau eksistensi Tuhan imanen dalam realitas (Donder, 2010). Teoekologi Hindu memandang bahwa Tuhan itu realitas alam semesta terdapat pada petikan sloka dalam Chandogya Upanisad III.14.1 yakni '*Sarvam khalv idam brahma*' yang maknanya Segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa dan pada Maitri Upanisad IV.6 menyebutkan '*brahma khalv idam va va sarvam*' yang bermakna sesungguhnya jagat ini adalah Brahman (Radhakrishnan, 2008). Dalam Hindu Bali juga dikenal konsep Tri Hita Karana yakni tiga hubungan harmonis; yakni umat Hindu harus harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.

Dalam tradisi Islam, Allah telah menundukkan untuk umat manusia apa-apa yang ada di Bumi dan langit untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka (Asyura: 183). Allah juga menundukkan besi untuk manusia. Dari besi, manusia bisa membuat macam-macam alat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan ketidakbatasan hal yang ditundukkan oleh Allah kepada manusia telah menyebabkan berbagai kerusakan yang tampak di Bumi, baik di darat maupun di lautan. Ayat itu adalah sebagai peringatan kepada manusia agar tidak berlebihan dalam melakukan eksplorasi alam. Perintah larangan membuat kerusakan di muka bumi diulang dalam Al-Quran sebanyak beberapa kali, di antaranya dalam surat Al-Baqarah: 205, Al-A'raf: 56 dan 85. Tradisi Katolik meyakini bahwa Allah telah menciptakan manusia seturut dengan citra-Nya, segambar dengan rupa dia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi" (Kejadian 1:28). Tuhan menghendaki umat-Nya untuk menguasai dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang telah diciptakan-Nya dengan sikap etis manusia yang berupa tindakan pemeliharaan dan pelestarian, dimana perintah tersebut tertulis pada pasal 29 kitab yang sama, yang berbunyi: "Lihatlah, aku memberikannya kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh



bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu.”

Dalam tradisi Konghucu, Tuhan dipandang sebagai asal-usul alam semesta dan mengendalikan sistem pergerakan alam. Meski demikian, manusia memiliki kehendak yang bebas untuk menentukan pilihan dan tanggung jawabnya atas perbuatannya sendiri. *San cai* bersifat fisik, tidak bersifat abstrak. Dengan *san cai*, agama Khonghucu menekankan pada tanggung jawab manusia kepada Tuhan (Sang Pencipta), kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Konsep ini dikenal dengan ungkapan *Tian Ren He Yi* (Tuhan dan manusia bersatu). Sabda Nabi Kongzi: “Oranglah yang harus mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci yang mengembangkan manusia.” (Lunyu XV;29). Xun Zi (326-233 S.M) secara tegas membedakan antara pekerjaan Tuhan (*Tian dao*), pekerjaan manusia (*ren dao*) dan alam (*den dao*). Pekerjaan manusia adalah membina diri, menolong orang lain serta memahami cara kerja alam, agar manusia tidak menjadi korban bencana alam dan penyakit menular. Karenanya, konsep harmoni menjadi kunci yang meliputi, harmoni dengan Udara, harmoni dengan air, harmoni dengan tanah, harmonisasi dengan hewani dan botani

## **Metode**

Religiosity index memotret agama tidak semata memotret agama sebagai *organizational category*, melainkan sebagai *analytical factor* yang mampu bertransformasi menjadi inspirasi manusia dalam kehidupannya. Agama dalam religiosity index tidak dipahami sebagai afiliasi satu individu terhadap satu institusi agama tertentu, melainkan agama sebagai fakta sosial. Karenanya, religiosity index lebih menekankan pada *empirical cases* yang bersifat public, ketimbang privat dan individual. Keempat dimensi persaudaraan yang menjadi parameter penting keberagamaan kemudian dianalisis melalui *negative-indexing*. Dengan metode ini, keberagamaan diukur tidak melalui index persepsional yang sering kali bersifat personal, melainkan melalui *empirical examination* dan bersifat sosial. Proses eksiminasi



empiris terhadap empat dimensi persaudaraan ini dilakukan terhadap setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam analisisnya, Religiosity Index menggunakan Analytical Network Process (ANP) yaitu sebuah metode matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. ANP adalah pendekatan alternatif baru untuk studi kualitatif yang dapat mengkombinasikan nilai-nilai *Intangible* dan *judgement* subyektif dengan data-data statistik dan faktor-faktor *tangible* lainnya (Saaty, 2008). ANP juga merupakan generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan mempertimbangkan ketergantungan antara unsur-unsur dari hirarki. Banyak masalah keputusan tidak dapat terstruktur secara hirarkis karena mereka melibatkan interaksi dan ketergantungan unsur-unsur tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki di elemen level yang lebih rendah (Saaty, 2008). Banyak proses pengambilan keputusan suatu persoalan tidak dapat disusun dalam bentuk hirarki karena melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen-elemen yang lebih tinggi tingkatannya kepada level elemen yang lebih rendah. Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP tersebut berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternatif.

Dalam pengumpulan data, Religiosity Index akan menggunakan dua metode yaitu: **Open-Source Intelligence (OSINT)** dan **Human Intelligence (HUMINT)**. OSINT merupakan Teknik pengumpulan informasi yang tersedia untuk umum, baik itu melalui surat kabar, berita online, data-data resmi yang bisa diakses publik secara legal. Informasi dan data tersebut dikumpulkan untuk tujuan profesional dan analisis ilmiah. Walaupun informasi dan data tersebut diperoleh dari sumber yang terbuka, namun dapat memegang peran sangat penting dalam melahirkan analisis yang sangat tajam. HUMINT merupakan metode menjangkau informasi dengan melakukan pendekatan manusia kepada sumber informasi, bukan menggunakan mesin pencari (*Search Engine*). Salah satu metode dari HUMINT adalah penggunaan *survey online* yang didasarkan pada laporan dari semua Kepala KUA, penyuluh, penghulu,





para guru di Madrasah Negeri, para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota beserta para stafnya di seluruh Indonesia, yang akan dilaporkan secara online. Hasil investigasi HUMINT tersebut kemudian diproses dan divalidasi secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan Artificial Intelligence, untuk mendapatkan **Early Warning** dan **Early Response System**.

Dalam menganalisis permasalahan dan dampak (*exposure and impact*), olah data dilakukan dengan Coding System yang menjadi dasar utama penyusunan Indeks yang meliputi 4 dimensi utama Religiosity Index, yakni Kestinambungan Lingkungan (*Environmental Sustainability*), Persaudaraan Kemanusiaan (*Human Fraternity*), Persaudaraan Keagamaan (*Religious Fraternity*), dan Persaudaraan Kebangsaan (*National Fraternity*). Proses *Indexing* kemudian dilanjutkan dengan membuat *Subcode* setiap dimensi yang terbagi menjadi dua yaitu: *subcode* permasalahan atau *exposure* dan *subcode* dampak atau *Impact*.

Religiosity Index 2021 juga melakukan analisis kewilayahan, dari level provinsi sampai level kabupaten kota. Kemudian dari data *open-source* yang diperoleh, dapat ditemukan data atau informasi terkait tanggal dan lokasi kejadian. Lokasi tersebut dilengkapi dengan nama provinsi dan kabupaten/kota tempat kejadian. Kasus, tanggal dan lokasi kejadian tersebut kemudian menjadi bahan utama dalam analisa perhitungan *Relation Browser*. *Relation Browser* merupakan metode penghitungan untuk mengidentifikasi hubungan (*Relations*) dan kaitan (*Connections*) antara *Code* dan *Subcode* dari setiap dimensi. Dengan menggunakan aplikasi CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) Bernama MAXQDA, dapat ditemukan keterhubungan antara *code* dan *subcode* dari dampak setiap dimensi. *Relation Browser* merupakan nilai hubungan yang dihitung secara kuantitatif untuk mengukur *Likelihood* atau kemungkinan sebuah permasalahan dapat terjadi. Penghitungan tersebut berdasarkan pada pola atau tren kejadian sebuah kasus. Penghitungan tersebut juga mengukur *Impact* yang dihasilkan oleh permasalahan tersebut apabila terjadi. Proses



selanjutnya adalah melakukan perhitungan besaran resiko dengan rumus atau formula:

$$Risiko = \frac{Impact \times Likelihood}{Exposure}$$

Dari rumus tersebut bisa didapatkan nilai risiko di tiap dimensi. Di mana resiko ini berguna sebagai *Early Warning System* dan juga *Early Response System*. Proses perhitungan religiosity index mulai dilakukan yang didasarkan pada *constructing index* tiap dimensi dengan pola perhitungan atau rumus  $index = 100 - \text{resiko}$ . Akhirnya nilai Religiosity Index dari setiap provinsi dan kabupaten/kota dapat diperoleh.

### Temuan

Religiosity Index tahun 2021 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu **80,15** yang berarti telah masuk dalam **kategori Sangat Baik**. Angka tersebut diperoleh setelah melakukan analisa 8.701 kasus yang didapatkan melalui berita open-source dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Selain Open-Source, diperoleh juga 11.381 laporan survey dari 514 kabupaten/kota dari seluruh 34 provinsi di Indonesia.

Meskipun meraih nilai rata-rata Sangat Baik, namun kondisi faktual dari beberapa daerah sangat perlu mendapat perhatian khusus karena beberapa permasalahan keagamaan di wilayah tertentu berdasarkan hasil temuan Religiosity Index 2021 perlu mendapat mitigasi segera yang harus melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, maupun insan masyarakat. Mitigasi tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan, dan langkah taktis yang harus dilakukan oleh berbagai stakeholder. Temuan lapangan dalam Religiosity Index 2021 yang memerlukan mitigasi khusus antara lain:

1. Krisis Persaudaraan Kebangsaan yang perlu segera mitigasi segera agar risiko dapat dihindari (*Avoid Risk*) adalah di Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru. Di ketiga daerah tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi Anti-Pancasila yang semakin



meningkat. Selain itu, ada enam kabupaten yang sangat perlu penanganan bersama (*Share Risk*) dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait untuk dapat menekan laju krisis Persaudaraan Kebangsaan seperti meningkatnya narasi referendum Aceh Merdeka di kabupaten Aceh Timur, maraknya narasi anti-Pancasila/tegaknya Khilafah di Balikpapan, meningkatnya ancaman dari kelompok separatis bersenjata di kabupaten Intan Jaya dan Nduga, dan Puncak Jaya di provinsi Papua.

2. Krisis Persaudaraan Keagamaan yang perlu segera adanya mitigasi khusus adalah di Sintang dan kota Bandung karena meningkatnya ketegangan hubungan antar aliran/kelompok dalam satu agama, serta meningkatnya narasi kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama besar. Di kota Bandung juga ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain. Selain itu, ada enam kabupaten/kota yang memerlukan pendekatan kolaborasi antar stakeholder untuk menekan permasalahan persaudaraan keagamaan. Ke enam daerah tersebut adalah Ciamis, Paniai, Minahasa, Sidoarjo, Sampang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Pergerakan eks anggota HTI dalam menyebarkan propaganda Khilafah meningkat di Ciamis. Penolakan pembangunan mesjid dan gereja Katolik kembali meningkat di Paniai, dan berbagai aksi pergerakan eks FPI dalam memperjuangkan ideologi mereka di Minahasa, Sidoarjo, Sampang dan Tasikmalaya.
3. Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan yang perlu adanya mitigasi khusus segera adalah di kota Paniai, Sorong, Deiyai, dan Jambi. Kerusuhan rasial dan kerusuhan antar suku di Paniai, Sorong, dan Deiyai, dan kerusuhan terkait lahan di Jambi.
4. Permasalahan Kesenambungan Lingkungan yang sangat perlu adanya mitigasi khusus adalah di Bengkulu, Batam, Aceh Tenggara, Pinrang, Wonosobo, Manado, Lombok Timur, Mataram, Maluku Tengah, dan Pacitan akibat masifnya alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Jayapura, Landak,



Luwu Timur, Merauke, Takalar, Aceh Timur, Bengkayang, Ambon, Bandung Barat, Wajo, dan Kabupaten Bandung memerlukan kolaborasi antar instansi dan tokoh daerah agar dapat bersama-sama memitigasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi di daerah tersebut.

## **Analisis Masalah**

Kondisi faktual dari berbagai daerah yang memerlukan mitigasi khusus telah ditampilkan. Dengan menggunakan pendekatan empat dimensi Religiosity Index, permasalahan apa saja yang rata-rata menjadi permasalahan nasional akan dijelaskan berikut.

### **Dimensi Permasalahan Persaudaraan Keagamaan**

No	Problems	Total Cases	%
1	Tension Between Religious Sect Differences	733	67.43%
2	Refusal to Establish Worship Houses for Other Religions	130	11.96%
3	Other Religion Issues	98	9.02%
4	Tension Between Religious Groups	69	6.35%
5	Refusal for Certain Religion Sects	57	5.24%
	TOTAL	1,087	

Dinamika hubungan antar aliran dalam satu agama menjadi permasalahan yang paling tinggi terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 67,43%. Yang kedua adalah penolakan membangun rumah ibadah agama tertentu oleh masyarakat sebesar 11,96%. Penolakan keberadaan penganut Ahmadiyah, Syiah di beberapa daerah, penolakan Haré Khrisna oleh masyarakat Hindu Bali, serta pelarangan pembangunan gereja dan masjid/Mushola masih terjadi di beberapa daerah. Sedangkan ketegangan hubungan antar umat berbeda agama justru tidak begitu sering terjadi. Temuan ini menandakan bahwa toleransi antar umat beragama yang berbeda semakin membaik, atau masyarakat semakin toleran terhadap umat agama yang berbeda. Namun dari temuan tersebut justru memunculkan permasalahan lainnya, yaitu ketegangan antar aliran dalam satu agama justru semakin besar.



No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Tension Between Religious Sect Differences	44	6.00%	350	47.75%	339	46.25%
2	Refusal to Establish Worship Houses for Other Religions	15	11.54%	57	43.85%	58	44.62%
3	Other Religion Issues	1	1.02%	43	43.88%	54	55.10%
4	Tension Between Religious Groups	2	2.90%	39	56.52%	28	40.58%
5	Refusal for Certain Religion Sects	2	3.51%	24	42.11%	31	54.39%
	TOTAL	64		513		510	

Permasalahan keagamaan di Indonesia cenderung lebih memburuk (*worsen*) dan belum ditemukan jalan keluarnya (*unresolved*). 54,39% Kasus penolakan terhadap aliran agama lain justru semakin memburuk, 42,11% kasusnya tidak ada jalan keluar, dan hanya 3,51% kasus yang dapat ditemukan solusinya. Penyelesaian cukup baik dapat dilihat dari jumlah kasus penolakan pendirian rumah ibadah agama tertentu. 11,54% dari 130 kasus yang ada dapat ditemukan solusinya sehingga tidak ada eskalasi konflik.

### **Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kebangsaan**

No	Problems	Total Cases	%
1	Establishment of New State/Khalifah/Anti-Pancasila State	2604	65.21%
2	Pro Separatism Movement	1134	28.40%
3	Partially and/or Anti Certain Religious Groups	185	4.63%
4	Anti-Government Movement	63	1.58%
5	Partially and/or Anti Certain Race and Ethnicity	7	0.18%
	TOTAL	3993	

Permasalahan utama persaudaraan kebangsaan yang kronis dihadapi oleh Indonesia adalah narasi pembentukan negara baru berbasis khilafah dan anti-Pancasila. Pergerakan oleh pro/simpatian khilafah ini semakin meluas



dan intensif. Dibubarkannya HTI justru semakin membuat mantan anggotanya bergerak lebih massif dan berkembang menjadi sel-sel kecil yang sulit dideteksi. Selain itu, permasalahan separatistis juga cukup besar memberikan kontribusi dalam memperparah permasalahan kebangsaan. Aksi kekerasan dan terror yang dilakukan oleh kelompok pendukung Papua merdeka terus menelan korban, baik dari masyarakat, maupun dari pihak keamanan. Selain itu, pada tahun 2019, wacana referendum Aceh merdeka kembali menguat akibat residu permasalahan pasca Pemilihan Presiden 2019. Salah satu oknum mantan anggota GAM, sekaligus menjabat sebagai ketua Partai Aceh melontarkan wacana referendum karena pasangan Capres yang dia dukung kalah dalam kontestasi Pilpres lalu. Wacana tersebut menyebar dan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan di Aceh.

Yang menarik adalah minimnya kasus kebangsaan terkait anti ras/etnis tertentu di Indonesia. Dengan porsi 0,18%, kasus rasial di Indonesia dinilai sangat menurun. Sentiment negatif terhadap ras/etnis tertentu dapat memudar sejalan dengan sikap toleransi masyarakat yang semakin membaik. Dari angka tersebut, diharapkan kasus seperti tahun 1998, kasus Sampit tidak ada lagi. Namun tujuh kasus yang terjadi tidak dapat dianggap remeh karena apabila memburuk, dapat berkembang menjadi konflik rasial yang dapat menelan korban.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Establishment of New State/Khalifah/Anti-Pancasila State	34	1.31%	336	12.90%	2234	85.79%
2	Pro Separatism Movement	8	0.71%	133	11.73%	993	87.57%
3	Partially and/or Anti Certain Religious Groups	3	1.62%	39	21.08%	143	77.30%
4	Anti-Government Movement	0	0.00%	10	15.87%	53	84.13%
5	Partially and/or Anti Certain Race and Ethnicity	0	0.00%	0	0.00%	7	100.00%
	TOTAL	45		518		3430	



Permasalahan narasi pembentukan negara baru/khalifah/anti-Pancasila semakin memburuk (*worsen*). Hanya ada 1,31% kasus saja yang dinilai dapat diselesaikan. Masifnya persentase kasus yang memburuk ini menandakan bahwa negara sangat memerlukan solusi segera. Apabila tidak dimitigasi segera, pengaruh kelompok pengusung khalifah ini semakin mendapat banyak pendukung, baik dari dalam, maupun dari luar pemerintahan.

Selain itu, kasus pro-separatis juga dinilai semakin memburuk (87,57%). Berdasarkan hasil temuan data di lapangan, kelompok pro separatis, terutama di Papua tidak hanya bergerak mengangkat senjata, namun juga telah melakukan pendekatan *soft-approach* kepada masyarakat untuk mendukung pergerakan mereka. Pergerakan mereka tidak hanya terbatas di Papua dan Papua Barat saja, namun telah merambah ke berbagai kota di Indonesia seperti di Surabaya, Jogjakarta, Jakarta dan lain-lain. Hanya 0,71% dari kasus pro separatis saja yang dinilai dapat diselesaikan.

### **Dimensi Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan**

No	Problems	Total Cases	%
1	Violation of Personal Human Rights	481	57.40%
2	Violation of Private Ownership Rights	225	26.85%
3	Violation of Economic, Social & Cultural Rights	58	6.92%
4	Violation of Equality Before Law Rights	44	5.25%
5	Violation of Political Rights	30	3.58%
	TOTAL	838	

Pelanggaran Hak Asasi Pribadi menjadi kasus yang paling tinggi terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 57,4%. Hak asasi pribadi terkait dengan hak-hak dasar antara lain hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, hak untuk mengemukakan pendapat, hak beribadah menurut kepercayaan masing-masing, dan hak untuk berkumpul. Kasus kedua yang sering terjadi di Indonesia adalah pelanggaran atas hak milik pribadi sebesar 26,85%. Etnis atau suku tertentu masih dibatasi untuk memiliki tanah atau property di beberapa daerah.





No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Violation of Personal Human Rights	32	6.65%	196	40.75%	253	52.60%
2	Violation of Private Ownership Rights	10	4.44%	85	37.78%	130	57.78%
3	Violation of Economic, Social & Cultural Rights	2	3.45%	45	77.59%	11	18.97%
4	Violation of Equality Before Law Rights	0	0.00%	28	63.64%	16	36.36%
5	Violation of Political Rights	2	6.67%	18	60.00%	10	33.33%
	<b>TOTAL</b>	46		372		420	

Permasalahan persaudaraan kebangsaan di Indonesia cenderung tidak ada penyelesaian (*unresolved*) sebagaimana dapat dilihat persentase kasus yang tidak diselesaikan mayoritas berada di atas 40%. Temuan ini menandakan bahwa permasalahan kemanusiaan di Indonesia cenderung dibiarkan mengendap tanpa ditemukan solusinya. Hal ini berpotensi menjadi bahaya laten apabila terus berlanjut.

### **Dimensi Permasalahan Keberlangsungan Lingkungan**

No	Problems	Total Cases	%
1	Land Clearing	1,951	70.10%
2	Protected Forest Damage	424	15.24%
3	River Damage from Wastes	183	6.58%
4	Other Damages	81	2.91%
5	Water Resource Damage	69	2.48%
6	Air Pollution from Factories & Industries	45	1.62%
7	Lake, Coastal & Ocean Damage from Wastes	30	1.08%
	<b>TOTAL</b>	2,783	

Pembukaan Lahan menjadi permasalahan yang paling dominan di Indonesia. 70,1% dari tujuh permasalahan lingkungan hidup diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, permukiman dan lain sebagainya. Pembukaan lahan yang massif mengakibatkan bencana alam seperti banjir



dan longsor semakin sering terjadi yang mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan di berbagai daerah. Permasalahan lainnya yang cukup besar dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia adalah kerusakan hutan lindung sebesar 15.24%. Maraknya alih fungsi lahan hutang lindung atau deforestasi di berbagai wilayah mengancam.

No	Problems	Solved (Cases)	Solved (%)	Unresolved (Cases)	Unresolved (%)	Worsen (Cases)	Worsen (%)
1	Land Clearing	83	4.25%	865	44.34%	1,003	51.41%
2	Protected Forest Damage	23	5.42%	196	46.23%	205	48.35%
3	River Damage from Wastes	25	13.66%	81	44.26%	77	42.08%
4	Other Damages	2	2.47%	29	35.80%	50	61.73%
5	Water Resource Damage	4	5.80%	30	43.48%	35	50.72%
6	Air Pollution from Factories & Industries	9	20.00%	13	28.89%	23	51.11%
7	Lake, Coastal & Ocean Damage from Wastes	3	10.00%	8	26.67%	19	63.33%
<b>TOTAL</b>		149		1,222		1,412	

Permasalahan lingkungan di Indonesia rata-rata semakin memburuk. Selain itu, permasalahan tersebut juga tidak ada solusi atau tidak diselesaikan. Hanya sedikit presentase kasus lingkungan hidup yang dapat dibereskan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa permasalahan polusi udara oleh pabrik dan industri mendapat porsi persentase paling tinggi untuk diselesaikan, yaitu 20% dari permasalahan tersebut telah diperoleh solusinya.

## Rekomendasi

Religiosity index memotret empat dimensi persaudaraan. Hasil penghitungan Penelitian Religiosity Index yang telah dilaksanakan menghasilkan sebuah dashboard pemantauan. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya 14 kabupaten/kota yang dinilai sangat membutuhkan penanganan segera karena memiliki nilai paling rendah pada masing-masing Dimensi Religiosity Index. Berikut di bawah ini ke-14 kabupaten/kota tersebut beserta rekomendasi mitigasi permasalahannya.



Peta persoalan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat diakses melalui: <https://bit.ly/DashboardRELIX2021>

Provinsi	Mitigasi Persaudaraan Keagamaan	Mitigasi Persaudaraan Kebangsaan	Mitigasi Keberlanjutan Lingkungan	Mitigasi Persaudaraan Kemanusiaan
Aceh Timur	Monitor Risk	Share Risk	Share Risk	Control Risk
Balikpapan	Monitor Risk	Share Risk	Share Risk	Control Risk
Bandung Kota	Avoid Risk	Avoid Risk	Share Risk	Control Risk
Banjarmasin	Monitor Risk	Avoid Risk	Share Risk	Avoid Risk
Bengkulu	Control Risk	Control Risk	Avoid Risk	Control Risk
Ciamis	Share Risk	Monitor Risk	Control Risk	Avoid Risk
Intan Jaya	Monitor Risk	Share Risk	Monitor Risk	Control Risk
Jakarta Pusat	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Avoid Risk
Jambi	Control Risk	Control Risk	Control Risk	Control Risk
Manado	Monitor Risk	Control Risk	Monitor Risk	Control Risk
Nduga	Monitor Risk	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Paniai	Share Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Samarinda	Control Risk	Control Risk	Monitor Risk	Monitor Risk
Sorong Kotamadya	Monitor Risk	Monitor Risk	Monitor Risk	Share Risk

### **Krisis Persaudaraan Kebangsaan**

Risk Scales	Regions	Recommendation
<b>Avoid Risk</b>	Bandung	Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru berada dalam kategori BAHAYA dan harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi anti-negara dan anti-pancasila di kedua daerah tersebut.  Mainstreaming Moderasi Beragama, utamanya pada aspek komitmen kebangsaan, untuk kepala daerah dan ASN pemerintah daerah perlu segera dilakukan. Moderasi beragama yang menyoar tokoh agama juga perlu ditingkatkan.
	Banjarmasin	
	Banjar Baru	
<b>Share Risks</b>	Aceh Timur	



	Balikpapan	<p>Di enam daerah ini ditemukan 139 kasus yang umumnya adalah kasus pro-separatis dan narasi pendirian negara khilafah. Pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko dapat dikontrol.</p> <p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan di 4 daerah ini dapat diminimalisir.</p>
	Intan Jaya	
	Nduga	
	Puncak	
	Minahasa Utara	
<b>Control Risks</b>	Bengkulu	<p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan di 4 daerah ini dapat diminimalisir. Di empat kabupaten/kota ini terdapat 54 kasus. 32 kasus anti NKRI dan 22 kasus pro-separatisme. Pendekatan yang dilakukan untuk kabupaten ini adalah melalui monitoring, deteksi dini dan langkah preventif yang melibatkan masyarakat serta pemimpin daerah.</p>
	Jambi	
	Manado	
	Samarinda	
<b>Monitor Risk</b>	Ciamis	<p>Di empat kabupaten/kota ini terdapat 54 kasus. 32 kasus anti NKRI dan 22 kasus pro-separatisme. Pendekatan yang dilakukan untuk kabupaten ini adalah melalui monitoring, deteksi dini dan langkah preventif yang melibatkan masyarakat serta pemimpin daerah.</p>
	Jakarta Pusat	
	Paniai	
	Sorong	

### **Krisis Persaudaraan Keagamaan**

<b>Risk Scales</b>	<b>Regions</b>	<b>Recommendation</b>
<b>Avoid Risks</b>	Sintang	<p>Terkhusus Sintang dan Kota Bandung, terdapat 164 kasus, yang mana 133 diantaranya adalah kasus ketegangan hubungan antara aliran/kelompok dalam satu agama. Narasi</p>
	Bandung	



		<p>kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama sangat besar. Di kota Bandung juga ada ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dari agama lain. Dengan kondisi di Sintang dan kota Bandung saat ini, sangat diperlukan adanya Satgas Khusus penanganan ketegangan hubungan umat beragama, agar dapat memitigasi potensi-potensi perpecahan di Jawa Barat, dan di kota Bandung pada khususnya.</p>
<b>Share Risks</b>	Ciamis	<p>Di ketiga kabupaten/kota ini memerlukan pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko permasalahan keagamaan dapat dikontrol.</p>
	Paniai	
	Minahasa	
	Sidoarjo	
	Sampang	
	Tasikmalaya Kabupaten	
<b>Control Risks</b>	Bengkulu	<p>Dalam memitigasi permasalahan di empat kabupaten/kota ini perlu mengatur risiko melalui intervensi kebijakan agar dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan keagamaan di 4 daerah ini dapat diminimalisir.</p>
	Jambi	
	Samarinda	
	Gowa	
	Banda Aceh	
	Samarinda	
	Majene	
	Bogor Kabupaten	
	Banjarmasin	
	Intan Jaya	
	Manado	
	Nduga	
	Kota Sorong	



## Krisis Persaudaraan Kemanusiaan

Risk Scales	Regions	Recommendation
<b>Avoid Risks</b>	Paniai	Ketiga kabupaten/kota ini berada dalam kategori AVOID yang berarti permasalahan kemanusiaan di daerah ini harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berpotensi dapat terjadi
	Sorong	
	Deiyai	
	Jambi	
<b>Share Risks</b>	Memberano Raya	Memberano dan Dogiyai memerlukan pendekatan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama, dan penegakkan hukum diperlukan agar resiko permasalahan kemanusiaan di daerah ini dapat dimitigasi dan ditekan seminimal mungkin
	Dogiyai	
	Tanjung Jabung Barat	
<b>Control Risks</b>	Aceh Timur	Dalam memitigasi permasalahan kemanusiaan di delapan kabupaten/kota ini memerlukan kontrol risiko melalui intervensi kebijakan atau perubahan SOP pengamanan agar dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan kemanusiaan di ke delapan daerah ini bisa diminimalisir.
	Balikpapan	
	Bandung Kota	
	Bengkulu	
	Intan Jaya	
	Jambi	
	Manado	
	Nduga	

## Krisis Kesenambungan Lingkungan

Risk Scales	Regions	Recommendation
<b>Avoid Risks</b>	Bengkulu	10 kabupaten/kota ini dinilai berada dalam kategori AVOID yang berarti permasalahan lingkungan di daerah tersebut harus segera dimitigasi. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon permasalahan
	Batam	
	Aceh Tenggara	
	Pinrang	
	Wonosobo	
	Manado	
	Lombok Timur	



	Mataram Maluku tengah Pacitan	lingkungan hidup seperti alih fungsi/pembukaan hutan, pencemaran, polusi yang berpotensi dapat mengakibatkan bencana alam yang besar.
<b>Share Risks</b>	Sumbawa Barat	Ke empat kabupaten ini memerlukan pendekatan berbagi risiko, seperti dengan kolaborasi antar instansi negara dan komponen masyarakat sipil, utamanya tokoh-tokoh agama/masyarakat, dan korporasi. Penegakkan hukum diperlukan agar resiko pengerusakan lingkungan di daerah ini dapat dimitigasi dan ditekan seminimal mungkin
	Luwu Utara	
	Jayapura	
	Landak	
	Luwu Timur	
	Merauke	
	Takalar	
	Aceh Timur	
	Bengkayang	
	Ambon	
	Bandung Barat	
	Wajo	
<b>Control Risks</b>	Bengkulu	Dalam memitigasi permasalahan kemanusiaan di sebelas kabupaten/kota ini memerlukan pengaturan risiko melalui intervensi kebijakan dan mengubah protocol terkait menjaga lingkungan agar dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan di sebelas daerah ini dapat diminimalisir
	Dompu	
	Sumbawa	
	Kendal	
	Samarinda	
	Medan	
	Padang	
	Pohuwato	
	Solok Selatan	
	Tanjung Pinang	
	Pontianak	
	Agam	
	Tanah Laut	

Kabupaten/kota lainnya yang tidak masuk dalam ketiga kategori di atas, berarti masuk dalam kategori MONITORING RISK. Kategori ini menandakan bahwa daerah





tersebut masih memiliki permasalahan dari setiap dimensi Religiosity Index yang bersifat laten, namun permasalahan tersebut relatif beresiko rendah. Oleh karena itu, Rekomendasi untuk daerah yang masuk dalam kategori Monitoring Risk adalah tetap konsisten memantau dinamika yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat agar fungsi deteksi dini dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan agar instansi yang berwenang dapat menjalankan Tindakan preventif apabila ditemukannya potensi permasalahan dalam masyarakat.